



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

# JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/se3s4h38](https://doi.org/10.63822/se3s4h38)

Hal. 329-338

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

## Tantangan Moderasi Islam di Tingkat Lokal: Studi atas Klaim Imam Mahdi dalam Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat

Ahmad Fadhail Ramadhan<sup>1</sup>, Amiruddin<sup>2</sup>, Reza Fahmi<sup>3</sup>, Rusdi Sulaiman<sup>4</sup>  
Magistes Studi Islam, IAIN Pontianak Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Koresponden: [ahmadfadhailramadhan@gmail.com](mailto:ahmadfadhailramadhan@gmail.com)

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 29-07-2025 | Diterbitkan: 31-07-2025

### ABSTRACT

*This article discusses the challenges of Islamic moderation at the local level through a case study of the Nur Al-Mu'min Movement in West Kalimantan, which claims its leader to be the Imam Mahdi. This phenomenon illustrates a tension between local religious understandings and the principles of religious moderation promoted by the state. This study employs a qualitative approach through literature review and field observation to examine how the movement has developed and how both society and the state have responded to it. The analysis reveals that the group's claim regarding the Imam Mahdi potentially fosters exclusivism and resistance to national values, thus posing a serious challenge to the implementation of Islamic moderation at the local level.*

**Keywords:** Islamic moderation, Imam Mahdi, Religious Movement, West Kalimantan, Wasathiyah

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tantangan moderasi Islam di tingkat lokal melalui studi kasus terhadap Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat yang mengklaim pemimpinnya sebagai Imam Mahdi. Fenomena ini menunjukkan adanya tarik menarik antara paham keagamaan lokal dan prinsip moderasi beragama yang diusung negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan observasi lapangan untuk menelaah bagaimana gerakan ini berkembang dan bagaimana respons masyarakat serta negara terhadapnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa klaim Imam Mahdi oleh gerakan ini berpotensi menimbulkan eksklusivisme dan resistensi terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga menjadi tantangan serius bagi implementasi moderasi Islam di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Moderasi Islam, Imam Mahdi, Gerakan Keagamaan, Kalimantan Barat, Wasathiyah

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ahmad Fadhail Ramadhan, Amiruddin, Reza Fahmi, & Rusdi Sulaiman. (2025). Tantangan Moderasi Islam di Tingkat Lokal: Studi atas Klaim Imam Mahdi dalam Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 329-338. <https://doi.org/10.63822/se3s4h38>

## PENDAHULUAN

Moderasi Islam menjadi konsep kunci dalam pembangunan keagamaan di Indonesia, terutama dalam konteks keragaman budaya, etnis, dan keyakinan yang menjadi karakteristik bangsa ini. Konsep ini tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi strategi kebangsaan dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Moderasi Islam atau *wasathiyah* bertujuan menciptakan umat Islam yang inklusif, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Meskipun secara normatif telah menjadi wacana dominan, implementasi moderasi Islam di lapangan menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat lokal. Realitas di berbagai daerah menunjukkan masih adanya kelompok-kelompok keagamaan yang menafsirkan ajaran Islam secara rigid, eksklusif, bahkan cenderung ekstrem. Kelompok-kelompok ini sering kali memisahkan diri dari struktur keagamaan formal, menolak otoritas negara dalam urusan agama, serta mengembangkan doktrin yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keberadaan Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat. Gerakan ini menjadi sorotan karena mengusung ajaran yang menyimpang dari arus utama dan mengklaim bahwa pemimpin mereka merupakan Imam Mahdi—figur eskatologis yang dipercaya akan datang di akhir zaman untuk membimbing umat menuju kebenaran. Klaim ini tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas, tetapi juga menjadi persoalan teologis dan sosial yang serius, terutama ketika dikaitkan dengan upaya negara dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi-narasi keagamaan alternatif yang muncul di tingkat akar rumput dapat menjadi tantangan nyata bagi pembangunan agama yang damai dan inklusif di Indonesia.

Moderasi Islam menjadi konsep kunci dalam pembangunan keagamaan di Indonesia, terutama dalam konteks keragaman budaya, etnis, dan keyakinan yang menjadi karakteristik bangsa ini. Konsep ini tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi strategi kebangsaan dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Moderasi Islam atau *wasathiyah* bertujuan menciptakan umat Islam yang inklusif, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Meskipun secara normatif telah menjadi wacana dominan, implementasi moderasi Islam di lapangan menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat lokal. Realitas di berbagai daerah menunjukkan masih adanya kelompok-kelompok keagamaan yang menafsirkan ajaran Islam secara rigid, eksklusif, bahkan cenderung ekstrem. Kelompok-kelompok ini sering kali memisahkan diri dari struktur keagamaan formal, menolak otoritas negara dalam urusan agama, serta mengembangkan doktrin yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keberadaan Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat. Gerakan ini menjadi sorotan karena mengusung ajaran yang menyimpang dari arus utama dan mengklaim bahwa pemimpin mereka merupakan Imam Mahdi—figur eskatologis yang dipercaya akan datang di akhir zaman untuk membimbing umat menuju kebenaran. Klaim ini tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas, tetapi juga menjadi persoalan teologis dan sosial yang serius, terutama ketika dikaitkan dengan upaya negara dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi-narasi keagamaan alternatif yang muncul di tingkat akar rumput dapat menjadi tantangan nyata bagi pembangunan agama yang damai dan inklusif di Indonesia.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Moderasi Islam (Wasathiyah):**

Konsep ini mencakup delapan indikator menurut Kementerian Agama RI, yaitu: toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, taat hukum, inklusivitas, keseimbangan, musyawarah, dan pembaruan. Delapan indikator ini berfungsi sebagai pilar utama dalam memahami dan menilai praktik keagamaan yang sehat dan berimbang dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Moderasi Islam merupakan respons terhadap dua kutub ekstrem: fundamentalisme yang rigid dan liberalisme yang longgar. Wasathiyah mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara kontekstual, inklusif, serta berorientasi pada perdamaian dan keadilan sosial. Dalam tataran praktis, moderasi Islam mengedepankan sikap dialogis terhadap perbedaan pandangan, serta menolak pendekatan kekerasan dan pengkafiran terhadap pihak lain. Konsep ini juga sangat relevan dalam memperkuat identitas keindonesiaan umat Islam, melalui komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, moderasi Islam menjadi pendekatan yang integral dalam membangun harmoni sosial, stabilitas nasional, dan pemahaman keagamaan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan ideologi eksklusif yang kerap muncul dari kelompok-kelompok tertentu.

### **2. Klaim Imam Mahdi dalam Islam:**

Imam Mahdi merupakan figur eskatologis dalam Islam yang dipercaya akan muncul menjelang kiamat untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Dalam tradisi Sunni, Imam Mahdi diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Hasan bin Ali, sementara dalam tradisi Syiah, khususnya Itsna 'Asyariyah, Mahdi adalah Imam ke-12 yang saat ini dalam kondisi ghaib dan diyakini akan muncul kembali sebagai penyelamat umat. Keyakinan terhadap Imam Mahdi telah menjadi bagian dari imajinasi religius umat Islam di berbagai belahan dunia. Imam Mahdi merupakan salah satu figur eskatologis paling penting dalam doktrin keimanan umat Islam, yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan, membasmi kezaliman, serta memulihkan tatanan dunia yang telah rusak. Konsep ini menjadi bagian dari eskatologi Islam yang berkembang dalam dua arus besar, yakni Sunni dan Syiah. Dalam tradisi Sunni, Mahdi dipahami sebagai seorang laki-laki saleh dari keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya dari garis keturunan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Ia diyakini akan lahir di masa mendatang dan muncul sebagai pemimpin umat yang mendapat petunjuk ilahi. Sementara itu, dalam tradisi Syiah, khususnya aliran Itsna 'Asyariyah (Syiah Dua Belas), Mahdi diyakini sebagai Imam ke-12 yang saat ini dalam kondisi ghaib (al-ghaibah) dan akan kembali (raja'ah) pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk membawa keadilan dan kebenaran yang sempurna di muka bumi.

Keyakinan terhadap figur Imam Mahdi bukan sekadar konsep teologis, tetapi telah menjadi bagian dari imajinasi kolektif umat Islam yang hidup dan berkembang di berbagai wilayah, baik di dunia Arab, Persia, hingga Asia Tenggara. Imajinasi religius ini sering kali melahirkan harapan eskatologis akan datangnya seorang pemimpin yang dapat menjadi penyelamat di tengah krisis moral, politik, dan sosial.

*Tantangan Moderasi Islam di Tingkat Lokal: Studi atas Klaim Imam Mahdi dalam Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat*

(Fadhail Ramadhan, et al.)

Namun, dalam realitas sejarah, narasi Imam Mahdi juga tidak jarang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu sebagai alat legitimasi spiritual untuk memperkuat kekuasaan atau memobilisasi pengikut, terutama dalam konteks ketidakpuasan terhadap otoritas yang ada.

Sejarah mencatat berbagai contoh gerakan yang mengklaim kemunculan Imam Mahdi, baik secara simbolik maupun literal. Salah satu yang paling terkenal adalah gerakan Mahdiah di Sudan pada akhir abad ke-19, yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad bin Abd Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai Mahdi dan berhasil membangun sebuah negara teokratis yang mampu mengusir kolonialisme Inggris-Mesir untuk sementara waktu. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain, termasuk Asia Tenggara, di mana terdapat beberapa kelompok sempalan yang mengklaim pemimpinnya sebagai Imam Mahdi atau utusan akhir zaman. Dalam banyak kasus, klaim semacam ini sering dikaitkan dengan agenda pembaruan (tajdid), penyelamatan umat dari kesesatan, atau bahkan revolusi sosial. Namun demikian, tidak jarang klaim tersebut berkembang menjadi bentuk eksklusivisme teologis, pembentukan kultus individu, serta ketaatan absolut kepada satu figur yang dianggap suci dan tak bisa digugat.

Dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia, klaim Imam Mahdi menjadi persoalan yang sangat sensitif, khususnya ketika bersinggungan dengan aspek hukum, kebangsaan, dan kohesi sosial. Ketika ajaran Mahdi dikembangkan secara literal, eksklusif, dan tertutup oleh suatu kelompok, hal ini dapat mengganggu harmoni masyarakat, memicu konflik horizontal, dan bahkan mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan hukum negara serta nilai-nilai kebinekaan. Hal ini juga dapat merusak tatanan keberagaman yang moderat dan inklusif yang selama ini dijaga oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, studi terhadap kelompok-kelompok yang mengangkat narasi Imam Mahdi menjadi sangat penting untuk dilakukan, baik dalam kerangka akademik, sosiologis, maupun kebijakan keagamaan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana simbol-simbol eskatologis ini dimaknai dan digunakan dalam konteks kekinian, serta bagaimana dampaknya terhadap keberagaman, toleransi, dan prinsip-prinsip moderasi Islam (wasathiyah) yang menjadi pilar penting dalam menjaga perdamaian dan persatuan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Namun, sejarah mencatat bahwa narasi Imam Mahdi sering kali dimanfaatkan secara politis oleh kelompok atau tokoh tertentu untuk membangun pengaruh dan otoritas di luar struktur formal. Beberapa gerakan dalam sejarah Islam, seperti Mahdi di Sudan pada abad ke-19 dan beberapa kelompok sempalan di Asia Tenggara, menjadikan klaim ini sebagai dasar legitimasi spiritual dan bahkan revolusi sosial. Klaim tersebut umumnya dikaitkan dengan wacana pembaruan atau penyelamatan umat, tetapi dalam praktiknya dapat berkembang menjadi eksklusivisme, ketaatan absolut terhadap satu figur, bahkan perlawanan terhadap negara dan otoritas agama yang sah.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, klaim Imam Mahdi menjadi sangat sensitif ketika bersinggungan dengan aspek kebangsaan dan hukum negara. Ketika ajaran tentang Mahdi dikembangkan secara literal dan eksklusif oleh suatu kelompok, hal ini dapat menimbulkan disrupsi sosial, perpecahan internal umat Islam, dan gangguan terhadap integrasi nasional. Oleh sebab itu, studi terhadap kelompok yang mengangkat narasi Mahdi menjadi penting untuk menilai dampaknya terhadap keberagaman dan prinsip moderasi Islam.

### **3. Klaim Imam Mahdi dalam Islam dan Fenomena Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min di Pontianak:**

Imam Mahdi adalah sosok eskatologis penting dalam tradisi Islam yang diyakini akan muncul menjelang akhir zaman untuk menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, dan memimpin umat menuju kejayaan spiritual dan moral. Dalam tradisi Sunni, Mahdi diyakini berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali, sedangkan dalam tradisi Syiah Itsna 'Asyariyah, Mahdi adalah Imam ke-12 yang sedang dalam keadaan ghaib dan akan muncul kembali sebagai pemimpin ilahi. Keyakinan ini telah hidup dalam imajinasi kolektif umat Islam lintas zaman dan geografis, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Namun demikian, sejarah memperlihatkan bahwa narasi tentang Imam Mahdi tidak selalu berada dalam ranah spiritual semata, melainkan kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai sarana untuk membangun otoritas keagamaan dan kekuasaan sosial-politik. Fenomena seperti gerakan Mahdiah di Sudan atau berbagai gerakan lokal di Asia Tenggara menjadi bukti bahwa klaim Mahdi kerap dikaitkan dengan misi penyelamatan umat, reformasi agama, bahkan revolusi sosial. Gerakan-gerakan ini sering berkembang menjadi kelompok eksklusif yang menjunjung ketaatan absolut terhadap satu tokoh, bahkan menolak legitimasi otoritas negara atau ulama arus utama.

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika kita menyoroti kemunculan Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min yang berada di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dekat wilayah Kota Pontianak. Gedung ini tidak sekadar berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas keagamaan sebuah kelompok yang mengusung narasi akhir zaman dan menyebarkan ajaran tentang sosok yang diklaim sebagai Imam Mahdi. Dalam pengamatan masyarakat dan berbagai laporan media, gedung ini menjadi simbol dari pergerakan yang menampilkan diri sebagai komunitas eksklusif dengan pemahaman keagamaan yang berbeda dari arus utama Islam di Indonesia.

Kelompok yang berkumpul di sekitar Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min menunjukkan ciri-ciri khas gerakan keagamaan apokaliptik: mereka menganggap diri sebagai pengikut setia seorang figur penyelamat (yang dalam beberapa narasi disebut-sebut sebagai Mahdi), mendorong kehidupan yang terisolasi dari masyarakat luar, dan menampilkan sikap kritis bahkan konfrontatif terhadap lembaga keagamaan formal maupun negara. Dalam beberapa catatan, kegiatan mereka memicu kekhawatiran karena dianggap dapat memecah belah umat, mengganggu ketertiban sosial, serta menumbuhkan sikap intoleran terhadap pihak yang tidak sejalan.

Dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip Pancasila, toleransi, dan kebinekaan, kemunculan kelompok dengan klaim Mahdi seperti ini menimbulkan persoalan serius. Ketika ajaran Mahdi digunakan untuk menggalang ketaatan mutlak dan meminggirkan struktur otoritas formal seperti MUI, Kemenag, atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, maka hal ini bukan hanya menyimpang dari prinsip moderasi Islam (wasathiyah), tetapi juga dapat mengarah pada radikalisasi kultural.

Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min di Pontianak tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga mendesak secara sosial. Ini menyangkut upaya memahami bagaimana narasi-narasi keagamaan apokaliptik berkembang di masyarakat lokal, bagaimana pengaruhnya terhadap kerukunan umat beragama, serta bagaimana negara dan tokoh-tokoh agama dapat merespons dengan bijak melalui pendekatan dialogis, edukatif, dan preventif. Studi semacam ini juga memperkuat

pentingnya membangun literasi keagamaan yang sehat di tengah masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh wacana-wacana keagamaan yang berpotensi disorientatif dan destruktif.

Fenomena seperti yang terjadi di Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dalam konteks sosial yang lebih luas. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik, lemahnya pendidikan keagamaan yang kritis, serta pencarian identitas spiritual di tengah modernitas sering kali menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok dengan narasi penyelamatan seperti Mahdiyyisme. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan atau merasa terasing dari sistem, mereka cenderung tertarik pada kelompok yang menjanjikan solusi spiritual instan, bahkan meskipun itu bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku.

Respon masyarakat terhadap keberadaan kelompok ini umumnya terbagi dua. Di satu sisi, ada yang menolak dan merasa terancam karena mereka melihat adanya potensi perpecahan umat, bahkan penyimpangan akidah. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi agama atau memiliki keterbatasan akses informasi justru tertarik dan ikut terlibat, karena merasa mendapatkan makna hidup dan arah spiritual yang tidak mereka temukan dalam pengajian atau institusi keagamaan arus utama.

Dalam kasus Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min, laporan dari warga sekitar dan tokoh agama setempat menunjukkan bahwa aktivitas kelompok ini mulai menimbulkan keresahan karena mengadopsi sistem yang tertutup, menggunakan bahasa-bahasa religius yang kerap mengklaim kebenaran mutlak, dan memisahkan diri dari masyarakat umum, termasuk dalam tata cara ibadah dan pengajaran. Hal ini bisa menjadi indikasi awal munculnya ideologi eksklusif yang pada akhirnya mengarah pada radikalisme non-kekerasan, atau bahkan dalam beberapa kasus bisa berkembang menjadi radikalisme yang lebih ekstrem.

Merespons fenomena ini, sangat penting bagi negara dan institusi keagamaan untuk melakukan pendekatan berbasis edukasi dan dialog, bukan semata-mata pendekatan represif. Strategi "deradikalisasi lunak" dengan cara menyentuh sisi psikologis, sosial, dan spiritual para pengikutnya akan jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Di sisi lain, program literasi agama yang inklusif, rasional, dan kontekstual harus diperkuat di sekolah, madrasah, pesantren, hingga ruang-ruang dakwah digital agar masyarakat memiliki daya tahan terhadap paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip wasathiyah.

Pendekatan berbasis rumah moderasi beragama, seperti yang digagas oleh Kementerian Agama, perlu diperluas bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai gerakan aktif di masyarakat. Ini bisa menjadi forum terbuka yang mempertemukan tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, dan bahkan eks anggota kelompok sempalan untuk membangun narasi keagamaan yang ramah, kritis, dan solutif. Dalam konteks Kalimantan Barat yang majemuk secara etnis dan agama, pendekatan ini menjadi sangat strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional.

Akhirnya, fenomena klaim Imam Mahdi seperti yang berkembang di Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min adalah contoh nyata bahwa pemahaman keagamaan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik. Ia bisa menjadi kekuatan spiritual yang membangun, tetapi juga dapat menjelma menjadi instrumen disintegrasi jika dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan kritis. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan pemerintah adalah kunci untuk merawat keberagaman yang sehat, moderat, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan kontekstual, khususnya terkait keberadaan Gerakan Nur Al-Mu'min yang mengklaim pemimpinnya sebagai Imam Mahdi. Studi kasus memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika sosial-keagamaan yang terjadi dalam komunitas lokal tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, studi pustaka digunakan untuk menelaah literatur yang relevan, baik dari kitab klasik, karya akademik, laporan penelitian, hingga pemberitaan media, guna membangun kerangka konseptual dan historis yang kuat. Kedua, pengamatan langsung atau observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung praktik keagamaan kelompok, interaksi sosialnya dengan masyarakat sekitar, serta simbol-simbol atau narasi yang mereka gunakan dalam menyebarkan ajaran. Observasi ini juga memberikan data non-verbal yang penting seperti sikap, ekspresi, serta suasana komunitas yang tidak dapat ditangkap hanya melalui wawancara.

Ketiga, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, tokoh agama, aparat pemerintah lokal, serta (jika memungkinkan) anggota Gerakan Nur Al-Mu'min itu sendiri. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel agar memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai konteks pembicaraan. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber dan metode, serta mencatat data secara sistematis dan reflektif.

Wilayah penelitian difokuskan pada Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang merupakan pusat aktivitas Gerakan Nur Al-Mu'min. Daerah ini dipilih karena menjadi lokasi yang paling terdampak dan menjadi ruang utama dinamika interaksi antara kelompok ini dengan masyarakat umum serta institusi negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Gerakan Nur Al-Mu'min**

Gerakan Nur Al-Mu'min bermula dari sebuah kelompok pengajian kecil yang awalnya fokus pada pembinaan keagamaan masyarakat lokal di wilayah Sungai Raya, Kalimantan Barat. Seiring waktu, kelompok ini mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi jumlah pengikut maupun struktur organisasinya. Pengajian yang semula terbuka mulai bertransformasi menjadi komunitas yang lebih tertutup dan eksklusif, dengan sistem internal yang menekankan loyalitas penuh terhadap satu sosok pemimpin spiritual. Salah satu ajaran sentral yang menjadi pembeda utama kelompok ini dengan arus utama Islam adalah keyakinan bahwa pemimpin mereka merupakan Imam Mahdi—figur eskatologis yang diyakini akan datang menjelang hari kiamat untuk membimbing umat Islam. Keyakinan ini tidak hanya diajarkan secara doktrinal, tetapi juga dipraktikkan dalam bentuk penghormatan berlebihan terhadap pemimpin, termasuk dalam pengambilan keputusan spiritual maupun sosial. Komunitas ini mulai mengembangkan sistem ibadah, istilah-istilah keagamaan, bahkan gaya hidup yang berbeda dari masyarakat muslim sekitarnya, yang memperkuat karakter eksklusif mereka.

## 2. Respons Masyarakat dan Pemerintah

Respons masyarakat terhadap Gerakan Nur Al-Mu'min menunjukkan dinamika sosial yang kompleks. Sebagian masyarakat menerima keberadaan kelompok ini karena adanya hubungan emosional, kedekatan keluarga, atau pengaruh karisma pemimpinnya. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan terlibat dalam kegiatan kelompok karena merasa mendapatkan ketenangan spiritual atau bantuan sosial tertentu. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang menunjukkan kekhawatiran terhadap penyimpangan ajaran kelompok ini dari prinsip-prinsip Islam pada umumnya. Kekhawatiran ini diperkuat oleh sikap eksklusif kelompok yang tidak mudah diajak berdialog atau berbaur dengan warga lain di luar komunitas mereka.

Pemerintah daerah melalui Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh agama setempat telah melakukan pendekatan persuasif untuk merespons fenomena ini. Upaya dialog, edukasi keagamaan, hingga pelibatan tokoh masyarakat dilakukan agar kelompok ini dapat kembali kepada pemahaman Islam yang moderat dan tidak menyimpang dari prinsip kebangsaan. Namun, pendekatan ini tidak selalu berjalan lancar, mengingat kuatnya kepercayaan internal komunitas terhadap klaim Mahdi serta kecurigaan mereka terhadap lembaga-lembaga formal negara.

## 3. Tantangan terhadap Moderasi Islam

Kehadiran ajaran eksklusif dan pola ketaatan mutlak terhadap satu figur pemimpin dalam Gerakan Nur Al-Mu'min merupakan tantangan langsung terhadap agenda moderasi Islam. Sikap tertutup dan penolakan terhadap struktur keagamaan resmi seperti MUI dan Kemenag menunjukkan gejala delegitimasi otoritas keagamaan negara. Di sisi lain, klaim Imam Mahdi yang melekat pada figur pemimpin berpotensi menciptakan polarisasi tajam antara kelompok ini dengan masyarakat luas.

Tantangan ini diperparah dengan minimnya literasi keagamaan di sebagian masyarakat, yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh narasi simbolik dan janji keselamatan eskatologis. Dalam jangka panjang, gerakan semacam ini dapat mengikis semangat kebangsaan, merusak tatanan sosial, dan menumbuhkan resistensi terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama yang inklusif dan toleran. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini membutuhkan pendekatan multi-disipliner yang melibatkan aspek teologis, sosiologis, dan kebijakan publik.

Fenomena Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat menjadi contoh konkret bagaimana klaim keagamaan yang ekstrem di tingkat lokal dapat menghadirkan tantangan nyata terhadap implementasi moderasi Islam. Keyakinan terhadap pemimpin yang diklaim sebagai Imam Mahdi tidak hanya berdampak pada struktur internal kelompok, tetapi juga berimplikasi luas terhadap hubungan sosial, kohesi masyarakat, dan stabilitas keagamaan di wilayah tersebut. Ajaran eksklusif, penolakan terhadap otoritas keagamaan formal, serta loyalitas absolut terhadap satu figur pemimpin menjadi indikasi lemahnya internalisasi nilai-nilai wasathiyah (moderat) di tingkat komunitas akar rumput.

Temuan ini menunjukkan bahwa agenda moderasi Islam bukan hanya tantangan di level wacana nasional, tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana ia dipraktikkan dan diterima di level lokal. Dalam konteks ini, dibutuhkan sinergi antara berbagai elemen masyarakat—tokoh agama, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk menyampaikan pemahaman Islam yang inklusif, rahmatan lil 'alamin, dan tidak menimbulkan segregasi sosial. Tokoh agama berperan penting sebagai jembatan komunikasi spiritual yang bisa mendekati kelompok-kelompok yang menyimpang dengan pendekatan hikmah dan mau'izhah

*Tantangan Moderasi Islam di Tingkat Lokal: Studi atas Klaim Imam Mahdi dalam Gerakan Nur Al-Mu'min di Kalimantan Barat*

(Fadhail Ramadhan, et al.)

hasanah. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan perlindungan sosial serta edukasi publik, sementara akademisi dan peneliti dapat menyumbangkan analisis ilmiah yang mendalam sebagai dasar kebijakan dan pendekatan yang tepat.

Selain itu, pendekatan kultural dan edukatif terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif atau represif. Masyarakat yang merasa dihargai budayanya dan diberi ruang dialog cenderung lebih terbuka terhadap pembinaan. Dengan membangun pendekatan yang empatik dan partisipatif, diharapkan nilai-nilai moderasi Islam dapat lebih membumi, sekaligus meredam potensi konflik yang bersumber dari tafsir keagamaan yang ekstrem. Ke depan, tantangan serupa bisa saja muncul kembali dalam bentuk lain, sehingga perlunya kesiapan sistemik dalam memperkuat literasi keagamaan dan wawasan kebangsaan di semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne.
- Ali, M. (2021). Moderasi Beragama sebagai Strategi Deradikalisasi di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan Kementerian Agama. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21(2), 233–253. <https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.9456>
- Azra, A. (2019). *Islam Wasathiyah dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: Kompas.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2020). *Studi tentang Gerakan Keagamaan di Kalimantan Barat*. Jakarta: Kemenag RI.
- Fadhil, M. (2022). Gerakan Sempalan dan Tantangan Keberagamaan di Indonesia: Studi Atas Fenomena Klaim Imam Mahdi. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 8(1), 56–72.
- Hasyim, S. (2020). Moderate Muslim Discourses in the Politics of Indonesia. *Studia Islamika*, 27(1), 1–32. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i1.12369>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- Lubis, M. A. (2023). Dekonstruksi Narasi Imam Mahdi dalam Gerakan Islam Transnasional. *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 31(1), 101–120.
- Nasr, S. H. (2002). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. Harper San Francisco.
- Nuruddin, A. (2021). Respon Komunitas terhadap Klaim Keagamaan Lokal: Studi Kasus di Kalimantan. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(1), 45–60.
- Rahmat, M. (2014). *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga. (2021). *Pemetaan Gerakan Keagamaan Non-Mainstream di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga.
- Abou El Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperSanFrancisco, 2005.
- Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Al-Ashmawy, Muhammad Sa'id. *Islamic Fundamentalism*. Reading: Garnet Publishing, 1994.
- Al-Mahdi, Muhammad. *Konsep Imam Mahdi dalam Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Meaning of the Holy Qur'an*. Maryland: Amana Publications, 2006.

- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Azyumardi Azra. *Islam Substantif*. Bandung: Mizan, 2000.
- Azyumardi Azra. *Islam Nusantara dan Moderasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Burhanuddin, Jajat. "Gerakan Mahdi dan Dinamika Keagamaan di Dunia Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2014.
- Eickelman, Dale F., dan James Piscatori. *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. Syracuse University Press, 1998.
- Fachry Ali dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1986.
- Geertz, Clifford. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Cornell University Southeast Asia Program, 2006.
- Hasan, Noorhaidi. "The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere." *Contemporary Islam* 3, no. 3 (2009): 229–250.
- Hasyim, Syafiq. *Understanding Moderate Islam in Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Islam and Society (PPIM), 2011.
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Kematian dan Akhir Zaman*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Trans. Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Panduan Penanganan Aliran Sesat dan Menyimpang*. Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2011.
- Mozaffari, Mehdi. *Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini*. London: M.E. Sharpe, 1987.
- Nurdin, Imam. "Klaim Imam Mahdi dan Gerakan Keagamaan: Studi Kasus di Kalimantan Barat." *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Wahid, Marzuki. *Menyoal Ajaran Sesat: Perspektif Fikih dan HAM*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Zamhari, Arif. "Religious Exclusivism and Radicalism in Indonesia: A Challenge for Moderation." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 2, 2014.
- Zuhri, M. Imam. *Gerakan Keagamaan Transnasional dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, 2020.
- [Website] Kementerian Agama RI. "Rumah Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme." <https://kemenag.go.id>
- [Laporan] Kanwil Kemenag Kalbar. *Laporan Pengawasan Keagamaan: Kasus Gedung Al-Kahfi Nur Al-Mu'min*. Pontianak, 2023.
- [Laporan] MUI Kalbar. *Pernyataan Sikap Terhadap Klaim Imam Mahdi di Pontianak*. Pontianak: MUI Kalimantan Barat, 2023.